



KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL
Sekretariat: Jl. Gugus Depan No. 2 Palmeriam Jakarta Timur Indonesia
Telp/fax: +6221 8502226, email: icc.indonesia@gmail.com

Siaran Pers

10 Tahun Berlakunya Statuta Roma Untuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)

“INDONESIA HARUS RATIFIKASI STATUTA ROMA SEGERA”

Pada tanggal 17 Juli 1998, melalui sebuah Konferensi Diplomatik di kota Roma, Italia, lahirlah Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute on International Criminal Court*) yang merupakan suatu mekanisme permanen untuk mengadili para pelaku kejahatan paling serius; yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Berdasarkan Pasal 126 Statuta Roma, Statuta ini akan mulai berlaku (*enter into force*) setelah memenuhi batas minimal 60 negara yang meratifikasi. Pada tanggal 1 Juli 2002, setelah 66 negara meratifikasi Statuta Roma, yang berarti telah melewati batas minimal sebanyak 60 negara yang menjadi syarat dapat berlakunya sebuah perjanjian internasional, Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional mulai berlaku. Hal ini berarti, pada 1 Juli 2012, Mahkamah Pidana Internasional telah berjalan selama 10 tahun.

Berbagai kasus-kasus kejahatan serius telah diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional, yang menumbuhkan keyakinan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius tidak lagi mendapatkan impunitas, dan mewujudkan keadilan bagi para korban. Sejumlah kasus yang telah diadili di Mahkamah Pidana Internasional diantaranya kasus kejahatan perang di Republik Demokratik Kongo, kasus kejahatan kemanusiaan di Pantai Gading, dan kasus-kasus di Kenya, Uganda, dan Libya.

Sampai dengan bulan Juni 2012, sebanyak 121 negara telah meratifikasi Statuta Roma. Indonesia sendiri sejak awal pembentukan Statuta Roma berjanji untuk meratifikasi Statuta Roma ini, karena dalam proses pengadopsian Statuta Roma, Indonesia terlibat secara aktif dengan mengirimkan delegasi untuk mengikuti Konferensi Diplomatik di Roma pada bulan Juli 1998, ketika Statuta Roma disahkan. Pada saat itu, Indonesia menyatakan dukungannya atas pengesahan Statuta Roma dan pembentukan Mahkamah Pidana Internasional.

Namun, upaya ini tak kunjung terealisasi. Pada tahun 2004, dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004 -2009, Indonesia merencanakan meratifikasi Statuta Roma pada tahun 2008 yang sayangnya tidak terimplementasi. Janji untuk meratifikasi ini kemudian kembali dinyatakan dalam RANHAM Periode 2011- 2014, yang menyebutkan Indonesia akan meratifikasi pada tahun 2013.

Ratifikasi Statuta Roma akan memberikan dampak bagi Indonesia untuk memperkuat sistem perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan memberikan kesempatan luas bagi Indonesia untuk terlibat aktif dalam perdamaian dunia dan pencapaian keadilan global. Indonesia juga akan mempunyai kedudukan setara dengan bangsa-bangsa lainnya yang sudah terlebih dahulu meratifikasi Statuta Roma dan memperkuat peranan Indonesia di dunia internasional, terutama untuk menjembatani dan menjadi penghubung antara negara-negara yang masih berjuang mengembangkan sistem hukumnya dengan negara-negara yang sudah lebih maju dan berkembang.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, mendesak pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Statuta Roma 1998, atau setidaknya melakukan langkah-langkah yang jelas untuk mengimplementasikan ratifikasi Statuta Roma pada Tahun 2013 sebagaimana direncanakan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asai Manusia (RANHAM) 2011-2014.

Dalam *Universal Periodic Review* Dewan HAM PBB Bulan Mei 2012, 15 Negara telah mengeluarkan rekomendasi agar Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma. Selain itu, *Internasional Coalition for International Criminal Court (CICC)*, sebuah koalisi masyarakat sipil yang berasal dari 150 negara, pada bulan Juli 2012 ini juga menargetkan Indonesia sebagai sasaran *Universal Ratification Campaign*. Hal ini berarti bahwa komunitas Internasional memandang penting bagi Indonesia untuk segera bergabung dalam bersama-sama negara-negara lain untuk mendukung pencapaian keadilan global.

Jakarta, 2 Juli 2012

Hormat Kami,



Mugiyanto

Convenor Koalisi

Contact Persons :

Mugiyanto/Ikohi (081399825960), Bhatara Ibnu Reza/Imparsial (08158084527), Zainal Abidin/Elsam (08129292015)

Sekilas Tentang Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Mahkamah Pidana Internasional:

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil yang mengkampanyekan ratifikasi dan implementasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Dalam pandangan Koalisi, kampanye dan penggalangan dukungan bagi Indonesia untuk ratifikasi Statuta Roma sangat penting. Selain karena sudah dicanangkan dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004-2009, dan kemudian dalam RANHAM 2011-2014, Ratifikasi Statuta Roma ini akan menjadi ukuran keseriusan Indonesia dalam rejim keadilan internasional dan menghentikan impunitas.

Beberapa kegiatan telah dilakukan oleh Koalisi yang sudah terbentuk sejak tahun 2006 terutama difokuskan pada pembuatan dan penyempurnaan Naskah Akademis dan RUU Ratifikasi Statuta Roma; sosialisasi mengenai pentingnya ratifikasi Statuta Roma bagi pemenuhan keadilan untuk korban dan perbaikan system hukum di Indonesia; melakukan advokasi dalam proses legislasi RUU Ratifikasi Statuta Roma di DPR RI; serta mendorong berbagai kebijakan pemerintah untuk merealisasikan ratifikasi Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional.

Struktur Koalisi

Convenor: Mugiyanto

Tim ahli:

Agung Yudhawirana, S.IP, LL.M, Bhatara Ibnu Reza, S.H., M.Si, LL.M., Irfan Hutagalung, S.H., LL.M, Zainal Abidin, S.H., Rully Sandra, LL.M.

Penasehat:

Enny Soeprapto, Ph.D, Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H., Galuh Wandita, Ifdhal Kasim, S.H., Kamala Tjandrakirana, M.A

Anggota:

Koalisi ini beranggotakan lembaga-lembaga dan individu yang menaruh perhatian pada reformasi sistem hukum, penegakan keadilan, dan hak asasi manusia di Indonesia, antara lain Elsam, IKOHI, Imparsial, PSHK, YLBHI, Demos, KontraS, PAHAM FH Unpad, FRR, dan berbagai organisasi lainnya dari seluruh Indonesia.